Student Account

1777272880276_cxtn9b_24009-69172-1-PB__2_

Assignment 5

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3552016426

Submission Date
Apr 27, 2026, 1:54 AM CDT

Download Date
Apr 27, 2026, 1:55 AM CDT

File Name
1777272880276_cxtn9b_24009-69172-1-PB__2_.docx

File Size
332.9 KB

19 Pages

6,642 Words

58,289 Characters

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

16% Internet sources
13% Publications
7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

16% Internet sources
13% Publications
7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
jurnal.um-tapsel.ac.id		7%
2	Internet	
www.researchgate.net		<1%
3	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
4	Internet	
journal-nusantara.com		<1%
5	Publication	
Tony Sitinjak, Ericko Pramudita. "THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA MARKETING AND ...		<1%
6	Internet	
digilibadmin.unismuh.ac.id		<1%
7	Internet	
repository.uir.ac.id		<1%
8	Internet	
ejournal.ipdn.ac.id		<1%
9	Internet	
www.portalkahwin.com		<1%
10	Publication	
Hernitawati Hernitawati, Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu. "IMPLEMENTAS...		<1%
11	Publication	
Chyntia Febrianti Wiyanto, Ilmi Usrotin Choiyirah. "Deficiencies in Bureaucracy a...		<1%

12 Internet
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id <1%

13 Internet
jurnal.stiatabalong.ac.id <1%

14 Publication
Desak Made Febri Purnama Sari, Stefanus Rendhy Wibisono, Putu Ratna Juwita Sa... <1%

15 Internet
ejournal.undar.ac.id <1%

16 Internet
repository.radenintan.ac.id <1%

17 Publication
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM RANGKA PEN... <1%

18 Internet
juris.id <1%

19 Internet
ojs.cahayamandalika.com <1%

20 Internet
repository.uin-suska.ac.id <1%

21 Student papers
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) <1%

22 Publication
Lailatul Romadhona, Ahmad Riyadh UB. "Implementasi Program Bantuan Panga... <1%

23 Student papers
Universitas Jenderal Achmad Yani <1%

24 Student papers
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya <1%

25 Internet
journalcenter.org <1%

26	Internet	
jurnal.unej.ac.id		<1%
27	Internet	
repositori.uma.ac.id		<1%
28	Internet	
jurmafis.untan.ac.id		<1%
29	Internet	
mahasiswaindonesia.id		<1%
30	Internet	
repository.unpas.ac.id		<1%
31	Internet	
ejournal.stikesbuleleng.ac.id		<1%
32	Internet	
infosulawesi.com		<1%
33	Internet	
lib.unnes.ac.id		<1%
34	Internet	
repository.uinsaizu.ac.id		<1%
35	Publication	
Regil Aurel, Adil Mubarak. "Implementasi Program Nagari Bersekolah Di Kabupat...		<1%
36	Internet	
eprints.uny.ac.id		<1%
37	Internet	
jurnal.likmi.ac.id		<1%
38	Internet	
jurnal.unismabekasi.ac.id		<1%
39	Internet	
marisalutfia.blogspot.com		<1%

40 Internet
ojs.unr.ac.id <1%

41 Internet
repository.ummat.ac.id <1%

42 Publication
Sukma Hartati, Muslih Fathurrahman. "Efektivitas Pembudayaan Gemar Membac... <1%

43 Internet
ejournal.upnjatim.ac.id <1%

44 Internet
es.scribd.com <1%

45 Internet
faktaindonesianews.com <1%

46 Internet
journalpublicuho.uho.ac.id <1%

47 Internet
ternak.blitarkab.go.id <1%

48 Internet
www.coursehero.com <1%

49 Internet
www.sorotkasusnews.net <1%

50 Publication
Eny Mufatiroh, Susi Ratnawati, Bagus Ananda Kurniawan. "IMPLEMENTASI PROG... <1%

51 Publication
Lia Juliasih, Astri Nur Asyifa, Akmala Hadita. "Evaluasi Implementasi Peraturan D... <1%

52 Publication
Riska Adita Syafitri, Oetje Subagdja, Gotfridus Goris Seran. "Implementasi Kebija... <1%

turnitin
JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Edward III di Desa Kajeksan Submission ID trn:oid:::1:3552016426
Ismawati, Hendra Sukmana

P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Edward III di Desa Kajeksan

Ismawati[1)], Hendra Sukmana[2)]

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

ismawtt21@gmail.com[1)]
hendrasukmana@umsida.ac.id[2)]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan. BPNT merupakan program bantuan sosial pangan yang disalurkan secara nontunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas aparatur desa dan agen BPNT ewarong. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menemukan beberapa dinamika dalam pelaksanaannya, seperti kendala teknis pada penggunaan aplikasi SIKSNG, perubahan data yang menyebabkan penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta keterlambatan dalam proses pencairan bantuan. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan akurasi pengelolaan data dan dukungan teknis sistem informasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BPNT di tingkat desa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, BPNT, Bantuan Sosial Pangan, Kebijakan Publik, Desa Kajeksan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the NonCash Food Assistance Program (BPNT) in Kajeksan Village. BPNT is a social assistance program distributed through a noncash mechanism to lowincome communities to help meet their basic food needs. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, indepth interviews, and documentation with informants consisting of village officials and BPNT ewarong agents. This study uses the policy implementation model of George C. Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results reveal several dynamics in its implementation, including technical constraints in the use of the SIKSNG application, changes in data that resulted in a decrease in the number of beneficiary families (KPM), and delays in the disbursement process. These findings highlight the importance of improving data management accuracy and strengthening technical support for information systems to enhance the effectiveness of BPNT implementation at the village level.

Key words: *Policy Implementation, BPNT, Social Assistance Program, Public Policy, Kajeksan Village*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kemiskinan masih merupakan masalah sosial yang signifikan yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang buruk, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Akibatnya, pemerintah terus mengembangkan berbagai program perlindungan sosial dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat. Menurut Amelia (2012), kemiskinan dapat didefinisikan secara ekonomi sebagai kurangnya kemampuan sekelompok orang untuk meningkatkan kesejahteraan dan

turnitin Page 7 of 25 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3552016426

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, pemerintah terus menciptakan berbagai program perlindungan sosial sebagai cara untuk mengurangi beban keuangan rumah tangga berpenghasilan rendah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Pratama dkk., 2024).

Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), jenis bantuan pangan sosial yang diberikan kepada rumah tangga penerima melalui sistem kartu elektronik, merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan lingkungan sekaligus mendorong efisiensi dan keterbukaan dalam penyampaian layanan sosial. Pada intinya, program bantuan sosial adalah alat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan mendistribusikan bantuan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Keefektifan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada seberapa baik para pelaksana lokal berkoordinasi satu sama lain dan seberapa siap sistem administrasinya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil program sangat dipengaruhi oleh tata kelola implementasi (Pratama dkk., 2024; Wahyuni dkk., 2023).

Melalui sistem distribusi nontunai yang lebih terbuka dan akuntabel, Program Bantuan Pangan NonTunai merupakan alat kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga penerima. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan BPNT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi beban keuangan rumah tangga berpenghasilan rendah (Mahmudah & Rahman, 2025). Untuk menjamin bahwa suatu kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan, berbagai aktor, sumber daya, dan struktur organisasi terlibat dalam proses implementasi. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, dedikasi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung semuanya memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Islami & Mursyidah, 2024).

Oleh karena itu, pemerintah menciptakan program BPNT sebagai cara untuk meningkatkan kebijakan, dan mulai mengimplementasikannya secara bertahap di 44 kota di Indonesia pada tahun 2017. Melalui Asosiasi Bank Milik Negara (Himbara), yang meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga penerima di bawah program BPNT. Dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KPM kemudian dapat menggunakan uang bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan telur di gerai kerja sama elektronik (eWarong) yang ditunjuk sebagai distributor BPNT.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang rentan terhadap risiko sosial. Program bantuan sosial pangan tersebut diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data utama yang memuat informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial serta menjadi acuan dalam penentuan penerima bantuan sosial.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pada agen atau e-warung yang telah bekerja sama dengan bank penyalur (Ariyanto et al., 2021). Dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan sosial non-tunai masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan koordinasi antar pelaksana program, serta kendala teknis dalam mekanisme penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh sistem

implementasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi di lapangan (Nursholihah, 2022; Wahyuni et al., 2023).

Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang termasuk d alam klaster pertama, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga yang bertujuan memenuh i kebutuhan pangan pokok masyarakat kurang mampu. Seiring dengan perkembangan implementasi nya, program ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia dengan menyesuaikan kesiapan sar ana dan prasarana penyaluran bantuan non-tunai.

Pendataan masyarakat penerima bantuan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejaht eraan Sosial Next Generation (SIKSNG) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data penerima bantuan, memantau penyaluran bantuan sosial, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas programprogram kesejahteraan sosial. Melalui sistem i ni, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai data program kesejahteraan sosial sehingga memu dahkan proses pengelolaan serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan so sial.

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sidoarjo, Desa Kajeksan yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Kajeksan dan Dusun Godekan secara rutin melaksanakan penyaluran program BPNT kepada masyarakat yang tergolong sebagai keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, mulai dari pemberian undangan kepada masyarakat penerima bantuan sebagai bentuk pemberitahuan pencairan dana BPNT hingga proses edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bantuan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain penyaluran bantuan, pemerintah desa juga berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan bantuan secara produktif. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen keuangan rumah tangga, pengembangan usaha kecil, serta pemanfaatan bantuan untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan dampak jangka panjang dari program bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan anggaran BPNT di Desa Kajeksan ;

Tabel 1.
Anggaran BPNT di Desa Kajeksan

No	Tahun	Jumlah KPM	Besaran Dana (Rp)	Anggaran
1	2021	158 KPM	Rp200.000 / Bulan	Rp379.000.000 / Tahun
2	2022	121 KPM	Rp200.000 / Bulan	Rp290.400.000 / Tahun
3	2023	105 KPM	Rp200.000 /Bulan	Rp252.000.000 / Tahun

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel 1, Menurut dari keterangan yang peneliti dapatkan di Desa Kajeksan Pengurangan Jumlah KPM selalu terjadi setiap tahun bahkan pada saat tahun 2024 jumlah KPM hanya sekitar 90 an orang saja, ini terjadi karena beberapa faktor seperti ada yang meninggal dunia, Peningkatan Kesejahteraan ekonomi keluarga KPM maka jumlah orang yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial bisa berkurang karena lebih banyak orang yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perubahan Kebijakan Pemerintah ,Pemerintah dapat mengubah kriteria atau persyaratan penerima bantuan sosial, yang mungkin mengakibatkan penurunan jumlah penerima. Misalnya, pemerintah bisa saja meningkatkan batasan pendapatan untuk menerima bantuan sosial, sehingga orang-orang dengan penghasilan yang lebih tinggi tidak lagi memenuhi syarat. , Dana yang di dapatkan dari Program BPNT di Desa Kajeksan sebesar tahun 2020- Sekarang Rp200.000/bulan, Sebelum adanya kartu ATM penerima bantuan BPNT hanya mendapatkan dana Rp110.000/bulan. Dana yang diterima dari BPNT secara langsung digunakan untuk membeli bahan makanan dan barang-barang pokok yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari keluarga penerima

manfaat. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang langsung bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, sambil juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi warung dan kios kecil sebagai Agen dalam program ini.

"Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)" telah dibahas dalam sejumlah publikasi sebelumnya. Misalnya, penelitian Yoan Deman tahun 2021, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis." Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, saat ini diimplementasikan secara tidak memadai, menurut temuan penelitian tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan program BPNT merupakan hambatan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi publik secara menyeluruh mengenai implementasi program BPNT otonom ini. Kedua, penelitian sebelumnya yang berjudul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur" dilakukan oleh Bagi dkk. Pada tahun 2023, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah dilaksanakan di Desa Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur. Pelaksanaan program ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, persiapan, distribusi, dan penggantian KPM masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam mencari uang karena adanya identitas ganda, saldo kosong, dan masalah kartu. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonsunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa" adalah judul studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wildayantai (2023). Menurut studi sebelumnya, implementasi BPNT di Desa Bontonsunggu memenuhi persyaratan bagi peserta Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat terdampak oleh keberadaan pengguna Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan demikian, telah dilaporkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonsunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sedang dilaksanakan sesuai jadwal. Saat ini terdapat sedikit penelitian yang secara khusus mempelajari implementasi BPNT di tingkat desa menggunakan model perspektif implementasi kebijakan Edward III, meskipun beberapa studi sebelumnya telah meneliti implementasi BPNT di berbagai lokasi. Untuk memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan BPNT di tingkat pemerintahan desa, penelitian ini dilakukan.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen pelaksana sehingga sinergi antar unsur tersebut menjadi syarat penting tercapainya tujuan kebijakan (Mahmudah & Rahman, 2025). Transparansi dalam proses penyaluran bantuan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan (Fardi & Pratama, 2023). Hambatan implementasi kebijakan sosial seringkali berasal dari faktor administratif dan teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kendala sistem informasi. Hambatan ini perlu diatasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal (Imanuddin et al., 2019).

Berdasarkan Observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kajeksan dalam pelaksanaannya. Diantaranya; pertama, permasalahan pendataan masyarakat miskin, ada masyarakat yang bisa dikatakan mampu dalam hal ekonomi mendapatkan BPNT sedangkan masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tidak mendapat BPNT dan hal itu menjadi kontra di masyarakat sekitar. Sehingga program BPNT ini pelaksanaanya masih kurang tepat sasaran bagi beberapa masyarakat miskin, kedua, Permasalahan dari sistem aplikasi SIKS-NG terkadang mengalami eror seperti data tidak sesuai, data double, dan pemerintah desa kajeksan masih kesulitan untuk mengurus menghapus data masyarakat desa yang sudah meninggal karna kelola aplikasinya belum maksimal, ketiga

permasalahan ketika pencairan dana BPNT terkadang ada masyarakat yang mengeluh kartu ATM masih kosong atau bisa dikatakan proses pencairannya telat di banding masyarakat lain di karenakan kesalahan dari data. Tentunya harapan dari masyarakat sekitar kepada pelaksanaan program BPNT ini bisa lebih di laksanakan dengan adil dan jujur, serta di harapkan pemerintahan desa kajeksan rutin melakuakan pendataan ulang KPM, agar semua masyarakat miskin di desa kajeksan merasakan program BPNT ini secara merata.

Berbagai penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada tingkat kabupaten atau kecamatan dengan menyoroti efektivitas kebijakan, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran program. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi BPNT pada tingkat desa masih relatif terbatas, terutama yang menelaah dinamika pelaksanaan program secara langsung pada aktor pelaksana di tingkat desa. Padahal, desa merupakan unit pemerintahan yang berperan penting dalam proses verifikasi data, koordinasi dengan agen e-warong, serta penyampaian informasi kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan BPNT di tingkat desa serta memberikan kontribusi bagi penguatan implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat lokal. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam program bantuan sosial adalah akurasi data penerima manfaat. Data yang tidak mutakhir berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan sasaran sehingga efektivitas program menjadi berkurang (Galvin et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) diimplementasikan di Desa Kajeksan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mempertimbangkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, seperti kompetensi pelaksana; c) disposisi mengacu pada karakter dan sifat pelaksana, seperti dedikasi, integritas, dan sifat demokratis. Pelaksana dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan maksud pembuat kebijakan jika mereka memiliki sikap positif. Proses implementasi kebijakan juga akan tidak produktif jika pelaksana dan pembuat kebijakan memiliki sikap atau pandangan yang berbeda; d) Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan memiliki dampak besar pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Kekacauan Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan ciri struktur organisasi. Proses operasional yang terstandarisasi dan struktur birokrasi yang terdefinisi dengan baik merupakan komponen penting yang membantu efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, dedikasi para pelaksana juga memengaruhi kualitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat umum (Zulfia et al., 2023).

METODE

Untuk lebih memahami bagaimana Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diimplementasikan di Desa Kajeksan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Data berupa deskripsi naratif (dalam kata-kata) tentang orang dan tindakan yang diamati dihasilkan menggunakan pendekatan kualitatif. Penekanan penelitian, yang memanfaatkan gagasan teoritis dari pendekatan kualitatif, juga memungkinkan peneliti untuk secara tepat dan metodis menggambarkan fenomena yang terjadi dan menjelaskan hubungan antar fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Analisis data merupakan tahap selanjutnya dari penelitian setelah pengumpulan data. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk sepenuhnya mengkarakterisasi peristiwa yang terjadi dalam implementasi program BPNT di tingkat desa, teknik kualitatif digunakan.

Pengambilan sampel bertujuan, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi program BPNT, digunakan untuk memilih informan penelitian. Empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima

turnitin Submission ID trn:oid:::1:3552016426

bantuan, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan satu agen BPNT (e-warong) dipilih sebagai informan penelitian dari kalangan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BPNT di tingkat desa. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan membantu proses triangulasi data dalam penelitian, informan dipilih dari berbagai sumber.

Wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Untuk melihat secara langsung bagaimana program BPNT diimplementasikan di lapangan, observasi dilakukan. Informan yang telah ditentukan diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan detail yang lebih spesifik tentang pelaksanaan program BPNT di Desa Kajeksan. Sementara itu, catatan, arsip, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program BPNT digunakan untuk menambah data penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keaslian data. Triangulasi teknik melibatkan perbandingan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi yang dikumpulkan dari beberapa informan. Hasilnya, tingkat validitas yang lebih baik diharapkan untuk data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Informan penelitian terdiri dari:

Tabel 2.
Informan Penelitian BPNT di Desa Kajeksan

NO	Informan	Jabatan	Alasan Dipilih
1	Kepala Dusun	Penanggung jawab pendataan KPM serta pelaksanaan program BPNT di tingkat dusun	Memiliki informasi mengenai proses pendataan, perubahan data KPM, serta kendala yang terjadi dalam implementasi BPNT di Desa Kajeksan
2	Sekretaris Desa	Aparatur pemerintahan desa yang terlibat dalam administrasi dan pengelolaan dan bantuan sosial	Untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan data KPM serta koordinasi pelaksanaan program BPNT di tingkat desa
3	Agen BPNT	Pelaksana transaksi e-warong	Terlibat langsung dalam penyaluran bantuan
4	4 KPM	Penerima Manfaat	Untuk mengetahui kepuasan, kendala, dan akses BPNT

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Paradigma analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri dari tiga tahapreduksi data, penyajian data, dan kesimpulanditerapkan pada analisis data dalam penelitian ini. Dengan memilih dan memusatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, reduksi data dilakukan. Untuk memfasilitasi pemahaman peneliti tentang pola dan korelasi di antara data, data kemudian disajikan secara naratif. Menarik kesimpulan adalah fase terakhir, yang dilakukan secara metodis menggunakan data studi lapangan.

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kredibilitas yang tinggi dan bahwa temuan penelitian dapat dijelaskan dengan benar, validitas data diimplementasikan dalam penelitian ini. Triangulasi, yang melibatkan analisis data dari beberapa sumber dan menggunakan beragam teknik pengumpulan data, digunakan untuk menilai validitas data. Informasi dari beberapa informan penelitian yang terlibat dalam implementasi program BPNT, termasuk administrator desa, agen distribusi bantuan, dan kelompok penerima, dibandingkan untuk melakukan triangulasi sumber. Karena mereka memiliki pengetahuan langsung tentang keadaan ekonomi masyarakat, partisipasi aktif pejabat desa dapat meningkatkan efektivitas implementasi (Diana & Putri, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, yang mengatur Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), telah disetujui oleh pemerintah. Program BPNT, yang berupaya memberikan bantuan pangan non-tunai kepada keluarga berpenghasilan rendah, diatur oleh Peraturan Presiden ini. Peraturan Presiden terkait BPNT bertujuan untuk mengganti bantuan pangan berupa barang dengan bantuan pangan nontunai. Untuk mempermudah distribusi dan mengurangi kemungkinan pencurian, BPNT menggunakan sistem kartu elektronik. Selain membantu penerima manfaat memilih makanan berdasarkan kebut

turnitin Submission ID trn:oid:::1:3552016426

uhan mereka, hal ini meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi penyaluran bantuan. T emuan dan hasil penelitian disajikan oleh peneliti. Implementasi Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) di Desa Kajeksan menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada empat faktor yang , menurut George C. Edward III, mengatur keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur. Untuk menjelaskan implementasi bantuan pangan nontunai di Desa Kaj eksan, masingmasing dari keempat faktor ini akan diteliti secara individual. Temuan dari sebuah pene litian yang dilakukan di Desa Kajeksan adalah sebagai berikut (Edward III, 1984).

1. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi program telah dilakukan melalui sosialisasi oleh aparatur desa dan pendamping sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga serta penyampaian informasi secara langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Menurut Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan program sangat bergantung pada kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi BPNT di Desa Kajeksan pada aspek komunikasi dapat dikategorikan cukup berjalan, namun masih memerlukan peningkatan dalam konsistensi dan kejelasan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Karena komunikasi sangat penting untuk penyampaian kebijakan, para pelaksana harus sepenuhnya memahami kebijakan tersebut. George C. Edward III menambahkan bahwa dalam konteks komunikasi, sejumlah poin perlu diperjelas: Pertama, transmisi, yang menggambarkan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam mempraktikkan komunikasi yang efisien ketika melaksanakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan. Hal ini karena pemerintah kecamatan seringkali salah berkomunikasi satu sama lain. Kedua, kejelasan menunjukkan bahwa implementasi BPNT oleh pemerintah di Desa Kajeksan sangat efektif dalam memberikan komunikasi yang jelas. Untuk menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat desa, diperlukan inisiatif penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut karena beberapa individu masih belum memahami proses BPNT. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Indra, Kepala Dusun Godekan, Desa Kajeksan, yang mengawasi sebagian besar pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai.

"*Insyaallah di Kajeksan komunikasi tentang penyaluran BPNT terjalin dengan baik bagi KPM*

atupun Agen BPNT kalau sudah waktunya pencairan BPNT pasti saya langsung kasih tau Agen BPNT nya melalui WA atau langsung"

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, proses komunikasi dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan dinilai berjalan cukup baik. Informasi mengenai jadwal pencairan bantuan serta mekanisme penyaluran bantuan umumnya disampaikan melalui grup WhatsApp yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun, serta sebagian masyarakat penerima manfaat. Media komunikasi tersebut dinilai mempermudah penyampaian informasi secara cepat dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi BPNT di Desa Kajeksan telah berjalan cukup baik melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala komunikasi, seperti perbedaan pemahaman masyarakat mengenai prosedur program serta keterbatasan sosialisasi kepada seluruh KPM.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Edward III, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi secara cepat, tetapi juga menyangkut kejelasan, konsistensi, dan akurasi informasi yang disampaikan kepada seluruh pelaksana kebijakan. Dengan demikian, penggunaan media komunikasi informal seperti WhatsApp memang dapat mempercepat penyebaran informasi, tetapi tidak selalu menjamin kualitas koordinasi administratif yang berkaitan dengan validasi data penerima bantuan.

Permasalahan data ganda dan kartu kosong menunjukkan bahwa proses komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan data, seperti antara pemerintah desa dan sistem pendataan pada aplikasi SIKS-NG, belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung lebih dominan pada aspek penyampaian informasi operasional, sementara komunikasi terkait sinkronisasi data dan verifikasi penerima bantuan masih memerlukan peningkatan koordinasi yang lebih sistematis.

Gambar 1.1 Kegiatan Sosialisasi dan Penyaluran BPNT

Berdasarkan gambar diatas, Dapat di lihat bahwa sosialisasi penyaluran BPNT di Desa Kajeksan Sudah berjalan dengan baik dan dan lancar setiap bulannya, ini mencerminkan bahwa pemerintah Kajeksan sangat patuh terhadap aturan, transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa bantuan pangan sampai ke tangan yang tepat dengan cara yang efisien dan bermanfaat Bagi KPM. Menurut informasi yang peneliti dapatkan di lapangan dari keterangan Agen BPNT langsung bahwa BPNT di Desa Kajeksan di cairkan dua bulan sekali, berikut wawancara dengan Ibu Khoiri :

"BPNT sebetulnya satu bulan sekali ya tapi turunnya itu dua bulan sekali kalau jatahnya sekali turun Rp400.000 biasanya, ga gampang mbak jadi agen bpnt soalnya sulit sekali dapet izin dari dinsos sama banknya, kalau dari bank mudah dapet izinnya tapi kalau dari dinsos kan tidak tentu di kasih izin, sulit"

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa, untuk menjadi Agen BPNT pun

harus terdaftar dan mendapatkan izin yang sah baik itu dari Dinas Sosial atau Bank yang bekerja sama. Proses yang dilakukan pemerintah di desa dalam penyaluran BPNT melalui media massa kemudian tatap muka dan memberikan sosialisasi kepada KPM Setelah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) cair di desa, proses penyalurannya umumnya melibatkan beberapa langkah: 1). Pencairan Dana: Dana BPNT dikirim dari pemerintah pusat ke rekening bank yang telah ditunjuk untuk desa tersebut. 2).Pengumuman dan Informasi Pemerintah desa biasanya mengumumkan kepada masyarakat mengenai pencairan dana BPNT dan jadwal penyalurannya. 3). Penerimaan dan Verifikasi: Pihak desa, sering kali melalui petugas atau pengurus yang ditunjuk, akan memverifikasi data penerima manfaat dan memastikan bahwa mereka terdaftar dan berhak menerima bantuan. 4).Penyaluran Kartu atau Kupon Jika menggunakan sistem kartu atau kupon, penerima akan diberikan kartu BPNT atau kupon yang dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pangan di toko atau agen yang telah ditunjuk. 5). Belanja dan Pengambilan Barang: Penerima BPNT dapat menggunakan kartu atau kupon mereka untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di toko atau agen yang bekerja sama dengan BPNT / e - warung 6.) Pelaporan dan Dokumentasi: Desa harus melaporkan proses penyaluran bantuan kepada pihak yang berwenang serta memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik dan di upload di aplikasi SIKS-NG. berikut hasil wawancara dengan Ibu khoiri tentang pendapatnya tentang penyaluran BPNT di Desa Kajeksan.

"kalo yang saya rasakan masalah disini tidak ada mbak, orang-orang disini pada manut dan ga ribet nurut sama saya kalo misalkan saya bilang gini ya mau-mau aja ga banyak komplen, kalo ada krusakan atau kehilangan kartu ya langsung lapor ke desa"

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan Teori implementasi Edward III dalam Widodo (2010:97), proses penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak-pihak terkait berjalan dengan cukup efektif. Komunikasi dalam implementasi BPNT mencakup saluran informasi dari pembuat kebijakan (pemerintah pusat) kepada pelaksana kebijakan (dinas sosial dan bank), yang kemudian diteruskan kepada kelompok sasaran (masyarakat penerima). Proses ini terbukti dalam penyaluran BPNT yang lancar, dimana bimbingan teknis dan penyampaian materi pelatihan berjalan dengan baik, sehingga penerima manfaat memahami dan memanfaatkan bantuan dengan benar. Komunikasi yang baik dalam pengelolaan BPNT antara pemerintah, lembaga penyalur, dan masyarakat penerima memudahkan pengawasan dan evaluasi. Penerima manfaat juga aktif menyampaikan tanggapan dan umpan balik mengenai bantuan tersebut, yang membantu perbaikan dan penyempurnaan program. Prinsip penting yang diterapkan dalam penyaluran BPNT adalah pertama, pengelolaan bantuan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mereka. Kedua, alokasi anggaran untuk pelatihan aparatur dan peningkatan kapasitas petugas sangat penting agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Ketiga, harus ada transparansi dalam penggunaan dana serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan yang belum merata dapat menyebabkan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap prosedur program, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di tingkat penerima manfaat (Sulastri & Solihin, 2025).

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan BPNT di tingkat desa secara umum melibatkan aparatur desa, pendamping sosial, serta agen e-warong sebagai bagian dari struktur pelaksana program.yang berperan dalam proses pendataan serta pendampingan masyarakat.

Meskipun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program telah

menjalankan tugasnya dengan baik, masih ditemukan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Beberapa aparat desa mengalami kesulitan dalam melakukan pembaruan data penerima bantuan karena keterbatasan pemahaman teknis terhadap sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah pelaksana, tetapi juga mencakup kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem pendukung program.

Dalam perspektif Edward III, kecukupan sumber daya mencakup sumber daya manusia, inform asi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Keterbatasan pada salah satu aspek tersebut dapat mem engaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kendala teknis yang terjadi menunjukka n bahwa aspek sumber daya dalam implementasi BPNT belum sepenuhnya optimal.

Sumber daya ini memiliki berbagai kualitas termasuk keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan wawasan. Konsekuensinya, hasil atau keterampilan yang dicapai Pemerintah Desa harus mengarah pada kompetensi dan efisiensi yaitu harus mengerti kebutuhan masyarakat desa. dari hasil wawancar a bersama Bapak Suprapto selaku Sekretaris Desa Kajeksan yang menyatakan bahwa :

"Jadi kan dari dulu pendataan masyarakat itu manual, terus sekarang semuanya serba online, jadi pasti ada tantangan tersediri lah mengenai itu, apalagi disini kan ga semua orang faham akan pelayanan online, meskipun aplikasi biasa di kategorikan mudah, kadang ada yang perlu waktu lebih lama untuk belajar. Selain itu juga perlu memastikan aplikasi selalu berfungsi dengan baik, jadi saya harus benar-benar memilih perangkat desa yang cocok untuk program BPNT ini, selain itu pemerintah desa juga harus bekerja sama dengan warung agar program BPNT ini berjalan dengan lancar, kebetulan ada di dusun godekan itu pak rt punya toko jadi dia mengajukan izin ke dinsos sama bank jadilah sekarang di desa kajeksan Agen BPNT nya di Dusun Godekan Rt 04/rw 04.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi sistem pendataan melalui aplikasi SIKS-NG membawa perubahan dalam mekanisme pengelolaan data penerima bantuan. Meskipun sistem digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi pendataan, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa kesenjangan keterampilan teknologi serta kebutuhan adaptasi aparatur desa terhadap sistem pelayanan berbasis digital. Pelaksana penyaluran program BPNT di Desa Kajeksan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Pelaksana Penyaluran Program BPNT

NO	Nama	Jabatan	Tugas
1	Bapak M. Indra Wahyu S.	Kepala Dusun	Melakukan pendataan dan pelaporan terkait penyaluran BPNT di Desa Kajeksan melalui aplikasi Siks-NG
2	Bapak Suprapto	Sekretaris Desa	Mengelola administrasi serta membantu koordinasi pelaksanaan program BPNT di tingkat desa
3	Ibu Khoiri	Agen BPNT	Pemilik E-warung sebagai sarana tranksasi dana BPNT dan membeli sembako KPM

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

turnitin Submission ID trn:oid:::1:3552016426

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Kajeksan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda dalam proses implementasi kebijakan. Kepala dusun berperan dalam proses pendataan dan pelaporan melalui aplikasi SIKS-NG, sedangkan agen BPNT bertugas sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat penerima manfaat melalui e-warung. Diagram berikut menggambarkan hubungan antar aktor dalam implementasi BPNT di tingkat desa.

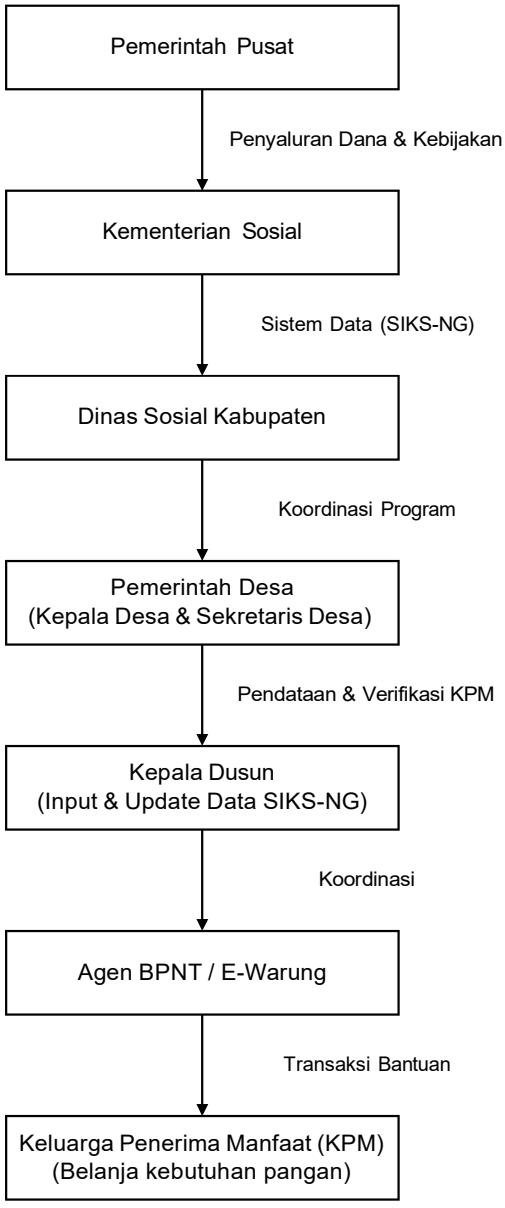

Gambar 1.2 Diagram Alur Implementasi BPNT di Desa Kajeksan

Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa implementasi program BPNT melibatkan beberapa aktor yang memiliki peran berbeda dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan serta penyaluran dana bantuan. Selanjutnya, Dinas Sosial di tingkat daerah berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan pemerintah desa.

Di tingkat desa, aparatur desa dan kepala dusun bertugas melakukan pendataan serta pembaruan data penerima manfaat melalui aplikasi SIKS-NG. Data tersebut kemudian menjadi

turnitin Submission ID trn:oid:::1:3552016426

dasar dalam proses penyaluran bantuan yang dilakukan melalui agen BPNT atau e-warung sebagai tempat transaksi bagi masyarakat penerima manfaat.

Diagram ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi BPNT tidak hanya bergantung pada satu aktor saja, tetapi merupakan hasil dari koordinasi antar lembaga serta dukungan sumber daya yang memadai pada setiap tingkat pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam proses pendataan masih menghadapi berbagai kendala teknis. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Indra selaku Kepala Dusun Kajeksan sebagai berikut:

"Kendala aplikasi SIKS-NG biasanya itu sering banget eror dan lemot contohnya sering banget udah hapus data masyarakat KPM yang sudah meninggal tapi datanya masih ada di aplikasnyu, kadang juga ada data yang double, tapi bagaimana pun itu kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar program BPNT trus berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara ketersediaan sistem teknologi sebagai sumber daya pendukung dengan efektivitas pemanfaatannya di tingkat implementasi. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan sistem digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data penerima bantuan. Namun di sisi lain, gangguan teknis pada sistem seperti data ganda serta keterlambatan pembaruan data menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Selain faktor teknis sistem, pelaksanaan program BPNT juga didukung oleh keberadaan agen e-warung yang menjadi tempat transaksi bantuan bagi masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Khoiri selaku agen BPNT sebagai berikut:

"Dari sebelum ada program BPNT saya jualan mbak, ya ga sulit sih soalnya orang-orang disini juga manut Insyaallah ndak ada kesulitan untuk saya, nasabah saya disini dulu itu ada sekitar 250 orang dari desa lain juga kesini sampai layani 3-4 hari terus semboko-sembako datang 1 truk kesini,mungkin orang-orang tau kalau di sini kan saya menyediakan barang bagus sesuai dengan harga pasar, kalau di tempat lain biasanya paketan sembakonya sudah di pilihi kalau disini mau ambil beras boleh, ambil telur, boleh,ambil ikan boleh pokonya Rp200.000 kalo sekarang enak mbak bebas bisa juga kartunya di gesek ambil uangnya"

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agen BPNT turut mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan pangan di tingkat desa. Fleksibilitas dalam pemilihan bahan pangan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Selain itu, masyarakat penerima manfaat juga merasakan kemudahan dengan adanya agen e-warung yang berada di wilayah desa. Hal tersebut disampaikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Ibu Sulastri warga di Dusun Godekan sebagai berikut:

"Kalau pencairan biasanya kami langsung ke e-warung yang ada di dusun. Di sana kami bisa memilih sendiri kebutuhan yang ingin dibeli seperti beras atau telur, jadi lebih mudah."

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agen BPNT sebagai fasilitas pendukung turut membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan pangan di tingkat desa. Fleksibilitas dalam pemilihan bahan pangan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Fenomena di atas apabila Apabila dikaitkan dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi BPNT di Desa Kajeksan mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung. Meskipun program telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem digital serta

gangguan teknis pada aplikasi SIKS-NG yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Secara umum, program BPNT di Desa Kajeksan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta perbaikan infrastruktur sistem informasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alam et al., 2023 yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta kendala teknis pada sistem informasi sering menjadi tantangan dalam implementasi program bantuan sosial, khususnya pada daerah yang sedang beradaptasi dengan sistem digitalisasi administrasi

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur desa di Desa Kajeksan menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), khususnya dalam membantu masyarakat memahami mekanisme penyaluran bantuan.

Sikap responsif pelaksana terlihat dari upaya aparatur desa dalam membantu masyarakat ketika mengalami kendala dalam proses pencairan bantuan. Aparatur desa juga berperan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait jadwal pencairan bantuan serta mekanisme penggunaan kartu bantuan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan dalam penanganan masalah administrasi, seperti keterlambatan pembaruan data penerima bantuan atau proses penyelesaian kendala pada kartu bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara komitmen pelaksana kebijakan yang dinilai cukup baik dengan kecepatan pelayanan dalam menangani permasalahan administrasi yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Edward III, disposisi pelaksana kebijakan mencakup sikap, komitmen, kejujuran, serta responsivitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila pelaksana memiliki sikap positif dan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan, maka implementasi program cenderung berjalan lebih efektif. Namun demikian, disposisi yang baik juga perlu didukung oleh kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan.

Selain peran aparatur desa, keberadaan agen BPNT atau e-warung di Desa Kajeksan juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program BPNT. Agen BPNT berfungsi sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat penerima manfaat serta menjadi sarana transaksi bantuan non-tunai. Selain itu, agen BPNT juga berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta melaporkan berbagai kendala yang terjadi kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, proses koordinasi antara pemerintah desa, agen BPNT, serta masyarakat penerima manfaat dinilai berjalan cukup baik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra sebagai berikut:

”Orang-orang sekarang itu pada ngerti media massa jadi pinter cari informasi tentang pencairan BPNT. Mereka sudah bisa memantau jadwal pencairan bantuan melalui situs web dan media sosial jauh sebelum waktu pencairan tiba. Keberadaan BPNT yang transparan dan aksesibilitas online ini mempermudah mereka dalam memperoleh informasi. Pemerintah desa juga aktif menjalin komunikasi yang baik dengan agen BPNT untuk memastikan kerja sama yang efektif. Jika ada permasalahan dari KPM, agen BPNT segera melapor ke desa, yang kemudian ditindaklanjuti hingga ke pusat. Saya juga memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur dengan baik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya”

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat desa memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan program BPNT serta berupaya menjaga

koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Selain itu, dari sudut pandang masyarakat penerima manfaat, pelayanan yang diberikan oleh agen BPNT juga dinilai cukup baik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KPM yaitu Ibu Khusnul yang menyatakan bahwa:

"*Pelayanannya baik mbak, apalagi bahan-bahan yang dijual di toko Bu Khoiri sama saja seperti yang saya beli di pasar, kualitasnya bagus. Biasanya kalau bantuan seperti ini berasnya banyak kutunya, tapi di sini kualitasnya bagus.*"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agen BPNT turut memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam hal kualitas bahan pangan yang diterima.
Selain itu, beberapa KPM juga menyampaikan bahwa meskipun pelayanan yang diberikan oleh agen BPNT dan aparatur desa dinilai cukup baik, masih terdapat kendala dalam proses penyelesaian permasalahan administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KPM yaitu Ibu Januari sebagai berikut:

"Kalau pelayanan di warungnya sih baik mbak, kalau belanja juga bebas pilih sembako. Tapi kadang kalau ada masalah di kartu atau saldo kosong itu harus menunggu dulu sampai diperbaiki datanya dari atas."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat pada dasarnya merasa terbantu dengan keberadaan program BPNT serta pelayanan yang diberikan oleh agen BPNT. Namun demikian, kendala administratif seperti saldo bantuan yang belum masuk atau permasalahan pada kartu bantuan masih menjadi hambatan yang dirasakan oleh sebagian penerima manfaat.

Fenomena di atas apabila dikaitkan dengan model implementasi kebijakan Edward III, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap positif pelaksana kebijakan dengan efektivitas pelayanan dalam menangani permasalahan administrasi. Di satu sisi, aparatur desa dan agen BPNT menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan program. Namun di sisi lain, beberapa kendala seperti keterlambatan penanganan masalah data penerima bantuan menunjukkan bahwa disposisi pelaksana yang baik belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pelayanan yang cepat dan efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi BPNT di Desa Kajeksan secara umum telah menunjukkan sikap yang positif serta komitmen yang cukup baik dalam mendukung keberhasilan program. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek responsivitas pelayanan, khususnya dalam menangani permasalahan administrasi yang dialami oleh masyarakat penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amanda et al., 2024 yang menyatakan bahwa sikap responsif serta komitmen pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan penerima manfaat sekaligus memperkuat keberhasilan implementasi program bantuan sosial di tingkat lokal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan imple mentasi kebijakan publik. Dalam perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur bir okrasi berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, mekanisme koordinasi antar pelaksana, serta k eberadaan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedures/SOP) yang menjadi pedo man dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisasi denga n baik dapat mempermudah proses implementasi kebijakan, sedangkan struktur yang terlalu komple ks berpotensi menimbulkan hambatan administratif.

turnitin Submission ID trn:oid:::1:3552016426

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan melibatkan beberapa aktor pelaksana yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan program tidak hanya berada pada tingkat pemerintah desa tetapi agen penyalur bantuan (e-warung), serta instansi pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pemerintah desa berperan dalam proses pendataan awal masyarakat, verifikasi kondisi sosial ekonomi warga, serta penyampaian informasi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, pendamping sosial bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan teknis, monitoring pelaksanaan program, serta membantu masyarakat ketika mengalami kendala dalam proses pencairan bantuan.

Pembagian tugas tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi BPNT telah tersusun secara formal sesuai dengan ketentuan pelaksanaan program. Kejelasan peran antar pelaksana membantu meminimalkan tumpang tindih kewenangan serta memungkinkan proses implementasi berjalan secara lebih sistematis. Aparatur desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan pendamping sosial berperan sebagai pelaksana teknis yang memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra dalam hasil wawancara berikut:

"kalau disini SOP pencairan dan BPNT udah sesuai, kalau ada pemberitahuan dari pusat dana BPNT nya udah cair ya langsung diproses besok harinya, pokoknya tinggal ikutin aturan dari pusat aja insyaallah di pastikan prosesnya transparan dan tepat sasaran, sehingga bantuan sampai ke tangan yang tepat dan bermanfaat untuk KPM."

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Kajeksan telah berpedoman pada prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keberadaan SOP memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana dalam menjalankan setiap tahapan program, mulai dari proses pendataan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara lapangan juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam proses koordinasi antar pelaksana kebijakan. Dalam beberapa kasus, proses pembaruan data penerima manfaat memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui beberapa jenjang birokrasi. Data masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi harus diajukan terlebih dahulu oleh pemerintah desa, kemudian diverifikasi oleh pendamping sosial, dan selanjutnya diproses melalui sistem pusat sebelum dapat diperbarui secara resmi.

Proses administratif yang panjang tersebut menyebabkan pembaruan data tidak dapat dilakukan secara cepat. Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara keberadaan struktur birokrasi yang secara formal telah tersusun dengan baik dengan efektivitas koordinasi yang masih menghadapi hambatan dalam praktiknya.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat menimbulkan fenomena fragmentation, yaitu terpecahnya tanggung jawab implementasi kebijakan ke dalam berbagai unit organisasi yang berbeda. Fragmentasi birokrasi berpotensi menyebabkan proses koordinasi menjadi kurang efisien serta memperlambat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, keberadaan prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan BPNT sebenarnya telah memberikan pedoman kerja yang jelas bagi para pelaksana kebijakan. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan SOP terkadang bersifat kaku dan kurang fleksibel terhadap kondisi sosial masyarakat di lapangan. Aparatur desa tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah data penerima manfaat secara mandiri, meskipun mereka mengetahui kondisi riil masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan diskresi pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

turnitin Page 21 of 25 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3552016426

Dari sisi masyarakat penerima manfaat, struktur birokrasi yang berlapis juga memengaruhi kecepatan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam proses pencairan bantuan. Salah satu KPM yaitu Ibu Rahma menyampaikan bahwa:

"Kalau ada masalah di kartu atau bantuan belum masuk biasanya harus menunggu dulu, mbak. harus dilaporkan ke mas indra dulu baru nanti diproses lagi dari atas, jadi kadang agak lama."

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat masih merasakan adanya keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan administrasi program. Kondisi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa proses pelayanan berjalan lambat, meskipun secara prosedural pelaksana di tingkat desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur birokrasi yang jelas, tetapi juga oleh tingkat efisiensi koordinasi serta fleksibilitas mekanisme kerja di dalamnya. Struktur birokrasi yang terlalu hierarkis dapat mengurangi responsivitas pelaksana kebijakan terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

Dalam konteks implementasi BPNT di Desa Kajeksan, struktur birokrasi pada dasarnya telah memberikan kerangka kerja yang cukup jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi lintas pelaksana serta penyederhanaan prosedur administratif agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan responsif.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik antar pelaksana, serta keberadaan prosedur operasional standar (SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Program BPNT di Desa Kajeksan, struktur birokrasi secara formal telah terbentuk dengan cukup baik, yang ditunjukkan melalui pembagian peran antara pemerintah desa, pendamping sosial, agen BPNT, serta instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Keberadaan SOP juga memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana dalam menjalankan program. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, temuan penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam aspek struktur birokrasi, khususnya terkait proses koordinasi yang harus melalui beberapa jenjang administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena fragmentation sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, yaitu terpecahnya tanggung jawab implementasi kebijakan ke dalam beberapa unit organisasi yang berbeda sehingga proses koordinasi menjadi lebih kompleks. Fragmentasi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami oleh masyarakat penerima manfaat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program BPNT di Desa Kajeksan telah berjalan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan efisiensi koordinasi antar pelaksana agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih cepat dan responsif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rismawati et al., 2025 yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang berlapis serta prosedur administratif yang panjang seringkali menjadi salah satu faktor yang menghambat kecepatan pelayanan dalam implementasi program bantuan sosial. Selain itu, penelitian Riwu et al., 2025 juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Implemenatsi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kajeksan berikut kesimpulan dan saran yang didapat,serta di kontraskan dengan kenyataan di lapangan

Pertama, aspek komunikasi. Komunikasi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Kajeksan sangat penting untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Proses komunikasi antara pemerintah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat penerima manfaat harus dilakukan secara efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra dan Ibu Khoiri, komunikasi dalam penyaluran BPNT di Desa Kajeksan sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi serta penyaluran bantuan secara rutin setiap bulan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat memahami mekanisme penyaluran bantuan. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pemerintah desa disarankan untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat penerima manfaat terkait mekanisme penyaluran BPNT, penggunaan kartu bantuan, serta prosedur pengaduan apabila terjadi kendala dalam penerimaan bantuan. Selain itu, perlu adanya media informasi seperti papan pengumuman desa atau grup komunikasi masyarakat agar informasi terkait penyaluran BPNT dapat diterima secara merata oleh seluruh KPM.Kedua, aspek sumber daya. Sumber daya dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Kajeksan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan fasilitas pendukung. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk melaksanakan program di lapangan, sedangkan sumber daya keuangan berkaitan dengan pendanaan program BPNT. Selain itu, sumber daya waktu berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan program dan sumber daya fasilitas mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan BPNT, kemampuan pelaksana dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG serta sikap tanggung jawab menjadi indikator penting dalam menunjang keberhasilan program. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG serta pengelolaan data penerima bantuan. Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan perangkat administrasi agar proses pembaruan data dan pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan akurat. Ketiga, aspek disposisi. Disposisi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Kajeksan menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik antara Pemerintah Desa Kajeksan, agen BPNT, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra. Pemerintah Desa Kajeksan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung implementasi program BPNT. Para KPM juga mengakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program cukup baik serta kualitas bahan pangan yang diterima dinilai layak. Meskipun demikian, pemerintah desa perlu terus menjaga komitmen dan koordinasi antara pelaksana program dengan agen BPNT melalui pertemuan evaluasi secara berkala untuk membahas kendala yang terjadi dalam penyaluran bantuan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengaduan yang jelas bagi KPM apabila terdapat permasalahan dalam penerimaan bantuan agar pelayanan program BPNT dapat terus ditingkatkan. Keempat, aspek struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Terdapat dua aspek utama dalam struktur birokrasi, yaitu mekanisme pelaksanaan kebijakan serta struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program BPNT umumnya telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan program agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi pelaksana yang sederhana dan jelas juga mempermudah proses koordinasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari komunikasi yang berjalan antara pemerintah desa dan masyarakat, adanya koordinasi antara pelaksana program, serta pelaksanaan penyaluran

turnitin Submission ID trn:oid:::1:3552016426

bantuan yang telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih diperlukan beberapa upaya perbaikan, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana pendukung, serta penguatan koordinasi antar pelaksana program agar pelaksanaan BPNT di Desa Kajeksan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi sistem perlindungan sosial kebijakan di Indonesia sebagai langkah menuju masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, *3*(2), 95–112.

Amanda, P. D., Najwa, Y., & Safiq, A.-. (2024). Analisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, *2*(1), 1–20.

Ariyanto, D., Wantu, S. M., & Aneta, Y. (2021). Implementasi bantuan pangan non tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(11), 1847–1855.

Diana, F., & Putri, W. (2023). Peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik di Desa Jubung. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *3*(4).

Edward III, G. C. (1984). *Public policy implementation*. JAI Press.

Fardi, M., & Pratama, I. N. (2023). Transparansi pendataan program bantuan sosial tunai dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, *3*(3).

Galvin, G., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengawasan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kompetensi aparatur, sarana prasarana, dan efektivitas bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 di Kota Surakarta. *Inovasi*, *17*(3), 410–416.

Imanuddin, M., Saraan, K., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. P. T. (2019). Analisis faktor penghambat implementasi alokasi dana desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, *9*(2), 151–157.

Islami, S., & Mursyidah, L. (2024). Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *14*(4), 532–546.

Mahmudah, N., & Rahman, A. (2025). Implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *JAPB*, *8*(1), 334–341.

Nursholihah, I. (2022). Efektivitas penyaluran bantuan sosial non tunai oleh pemerintah desa bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Neglasari. *Universitas Galuh*, 4354–4365.

Pratama, A. P., Manar, D. G., & Supratiwi. (2024). Implementasi kebijakan program sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2023. *Journal of Politic and Government Studies*, *13*(2).

Rismawati, R., Yunus, R., Sading, Y., & Yunus, S. (2025). Implementasi program bantuan

turnitin Submission ID trn:oid:::1:3552016426

pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Birobuli Selatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(8), 5340–5350. https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8343

Riwu, F. T. H., Riswanda, & Nursalam. (2025). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga terhadap gagal salur program bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *8*(2), 784–800.

Sulastri, E., & Solihin, D. (2025). Implementasi penyaluran program bantuan pangan non tunai pada masyarakat Desa Gunung Masigit. *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 28–45.

Wahyuni, W., Dwiarto, R., Ronida, S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, *5*(2).

Zulfia, H., Endrawan, G., Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi kebijakan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja organisasi pada pemerintah Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *14*(2), 171–184.